

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pelaksanaan Program Usaha Kemandirian Bagi Gepeng dan Pemulung di Kota Bandar Lampung oleh LKS APIK, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan program berjalan kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kesimpulan di bawah ini :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan belum bisa menjadi arahan dalam pelaksanaan program karena tidak memiliki kejelasan dan tidak dapat dilihat secara spesifik. Hal ini terlihat dari tidak tercapainya semua tujuan secara maksimal, khususnya tujuan mengurangi jumlah dan mengubah sikap/prilaku gepeng dan pemulung, serta untuk meningkatkan lebih banyak LKS dalam program.

2. Sumber Daya

Pemanfaatan sumber daya manusia, dana dan waktu belum maksimal, seperti staf dinas sosial yang tidak semuanya benar-benar terlibat dalam pelaksanaan, dan kurangnya jumlah staf LKS APIK. Selain itu kurangnya dana yang disediakan oleh pemerintah, dimana dana yang disediakan tidak seimbang dengan jumlah keseluruhan gepeng dan pemulung yang ada dan tidak bisa membiayai semua kegiatan dalam pelaksanaan program serta keterlambatan waktu pencairan dana.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana yang terlibat adalah, Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, LP3I, Unila, Permata Souvenir dan Boga Sari Baking Center. Karakteristik agen pelaksana harus bersikap adaptif, sikap ini telah diterapkan oleh LKS APIK, namun Dinas Sosial Provinsi belum menerapkannya terlihat jelas hanya untuk memenuhi tugas secara administratif saja.

4. Sikap Atau Kecenderungan Para Pelaksana

Pelaksana kebijakan baik dari LKS APIK maupun Dinas Sosial Provinsi menerima dan memahami program dengan baik karena program membantu menjalankan tugas dan fungsi pokok instansi mereka sebagai lembaga sosial.

5. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Bentuk komunikasi adalah koordinasi dan sosialisasi. Sosialisasi belum berjalan maksimal karena ketidakmampuan sebagian penerima manfaat dalam hal calistung. Mengenai kejelasan standar aturan, agen pelaksana program tidak sepenuhnya memahami standar aturan yang ada, hal ini terkait dengan tidak dilibatkan Dinas Sosial Kota dan tokoh agama atau masyarakat dalam pelaksanaan program, sasaran program yang tidak tepat, serta *punishment* yang tidak benar-benar diterapkan.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Lingkungan yang paling berpengaruh adalah lingkungan sosial dan ekonomi. Budaya di masyarakat yang beranggapan bahwa memberi lebih baik daripada menerima membuat penerima manfaat terutama pengemis kembali ke pekerjaan sebelumnya karena masyarakat masih sering memberi mereka uang

dan lemahnya kondisi ekonomi berdampak pada kesukarelaan atau kesedian mereka untuk mengikuti program.

B.Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Pemerintah atau Dinas Sosial seharusnya juga memberikan perhatian lebih terhadap masalah gepeng dan pemulung dengan cara meningkatkan jumlah alokasi dana untuk pemberdayaan gepeng dan pemulung.
2. LKS APIK terkait permasalahan ketidakmampuan penerima manfaat dalam calistung, sebaiknya memberikan pengajaran melalui tutorial, atau pemerintah dengan melibatkan Dinas Pendidikan, LSM/NGO. untuk membangun sekolah atau membuat program khusus bagi orang-orang tua yang buta aksara.
3. LKS APIK seharusnya melibatkan tokoh agama atau masyarakat pada tahap bimbingan mental dan sosial atau pada saat sosialisasi, agar pesan dapat disampaikan dengan pendekatan kekeluargaan.
4. LKS APIK sebaiknya menambahkan anggotanya dengan menggunakan sistem rekrutmen yang lebih terbuka terkait masalah kurangnya staf. Selain itu, mereka juga bisa bekerjasama dengan LKS lain atau bahkan dengan mahasiswa untuk membantu menjalankan program-program sosial.
5. LKS APIK maupun Dinas Sosial Provinsi seharusnya lebih konsisten dengan aturan dan segala sesuatu yang telah dibuat, seperti penetapan agen pelaksana, penerima manfaat dan waktu/jadwal pencairan dana.